



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kinerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai



dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Lampung dan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Gubernur terpilih yang terdapat di dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Interval Nilai Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE WARNA
1	91% ≤100%	Sangat Tinggi	Blue
2	76% ≤90%	Tinggi	Green
3	66% ≤75%	Sedang	Pink
4	51% ≤65%	Rendah	Yellow
5	≤50%	Sangat Rendah	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing



indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kinerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Gubernur Lampung serta tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran yaitu Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat dan 1 indikator kinerja (*out comes*) yaitu Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ton).

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 525/022/SK/V.22/V.3/2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan



memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (Ton)	834.990	844.521	101,14

Keterangan: *) Angka Sementara Tahun 2022

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.



- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai sampai dengan posisi Desember pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung**

Sasaran 1											
Sasaran 1		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat									
IKU		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat									
Satuan		Ton									
2019		2020				2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi*)	Capaian
661.690	781.664	118,13	664.293	810.493	122,00	822.650	854.060	103,81	834.990	844.521	101,14

Keterangan: *) Angka Sementara Tahun 2022

Sasaran 1		
Sasaran	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	
IKU	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	
Satuan	Ton	
2024		Nasional*)
Target	Capaian*)	Realisasi 2022
860.228	98,17	24.055.614

Keterangan: *) Angka Sementara Tahun 2022

Analisis pencapaian sasaran 1 yaitu meningkatnya produksi tanaman perkebunan rakyat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja indikator 1 "Jumlah produksi tanaman perkebunan rakyat" adalah dari target sebesar 834.990 ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan realisasi capaian sebesar 844.521 ton sehingga persentase capaian kinerjanya



adalah 101,14%, capaian ini dikategorikan dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori sangat tinggi.

Pada tahun 2019 target produksi perkebunan rakyat sebesar 661.690 ton dan terealisasi sebesar 781.664 ton, capaian kinerja indikator jumlah produksi tanaman perkebunan rakyat meningkat sebesar 118,13%. Pada tahun 2020 capaian kinerja indikator jumlah produksi tanaman perkebunan meningkat sebesar 3,69 persen dari capaian tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2020 dengan target 664.293 ton terealisasi sebesar 810.493 ton (122,00%). Pada Tahun 2021 target produksi sebesar 822.650 ton terealisasi sebesar 854.060 ton (103,81%).

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategi

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi*)	Capaian %
1	Jumlah produksi tanaman perkebunan Rakyat	Ton	834.990	844.521	101,14
	a. Lada Rakyat	Ton	15.464	15.455	99,94
	b. Kopi Robusta Rakyat	Ton	117.780	118.139	100,30
	c. Tebu Rakyat	Ton	189.606	184.006	97,04
	d. Karet Rakyat	Ton	164.706	192.395	116,81
	e. Kakao Rakyat	Ton	61.250	53.991	88,14
	f. Kelapa Sawit Rakyat	Ton	199.959	202.216	101,12
	g. Kelapa Dalam Rakyat	Ton	86.225	78.319	90,83

Keterangan: *) Angka Sementara Tahun 2022



Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: Indikator produksi tanaman perkebunan dengan target sebesar 834.990 ton terealisasi sebesar 844.521 ton dengan persentasi capaian kinerja sebesar 101,14%. Pada indikator produksi tanaman perkebunan sudah melampaui target yang ditentukan dan termasuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja kategori sangat tinggi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung masih terus melakukan upaya-upaya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung demi kemajuan pembangunan dibidang perkebunan.

Nilai Tukar Petani (NTP) perkebunan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani, indikator ini juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Jika nilai NTP > 100, berarti kesejahteraan petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar atau dapat diartikan juga petani



mengalami kenaikan dalam hal perdagangan. Jika $NTP = 100$, berarti petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan, sedangkan jika $NTP < 100$ berarti petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan.

Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perkebunan rakyat tahun 2022 yaitu sebesar 115,41 naik senilai 3,7 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 111,71. NTP sub sektor perkebunan rakyat tahun 2022 diatas 100 artinya harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibayarkan petani pekebun rakyat.

NTP Provinsi Lampung tahun 2022 untuk masing-masing subsektor tercatat Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) (94,65), Hortikultura (NTP-H) (107,55), Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) (115,41), Peternakan (NTP-Pt) (102,98), dan Perikanan (103,00). Sedangkan NTP Provinsi Lampung tercatat sebesar 104,30.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani pekebun rakyat adalah:

1. Meningkatkan produktivitas tanaman dengan perbaikan pola budidaya dan pemeliharaan tanaman.
2. Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk untuk meningkatkan nilai jual.



3. Mendorong petani untuk melakukan intercropping dengan tanaman lain yang bernilai ekonomis tinggi.
4. Meningkatkan efisiensi usaha budidaya.

Potensi dan Kondisi Perkebunan

Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung relatif mempunyai potensi pengembangan usaha komoditas perkebunan, sehingga pelaksanaan sosialisasi penggunaan dan pengawasan komoditas perkebunan masih perlu terus diperluas jangkauannya dengan memperhatikan azas prioritas dalam pemanfaatan anggaran kegiatannya. Ditinjau dari segi komoditas, maka potensi wilayah pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Selatan : Kelapa Dalam, Kakao, Karet, Sawit
2. Kabupaten Lampung Tengah : Kelapa dalam, Kelapa Sawit, Karet, Kakao
3. Kabupaten Lampung Timur : Kelapa dalam, Kakao, Karet, Lada
4. Kabupaten Tanggamus : Kopi, Kelapa Dalam, Kakao, Lada
5. Kabupaten Lampung Utara : Lada, Karet, Kopi, Sawit
6. Kabupaten Way Kanan : Karet, Kopi, Kelapa Sawit, Lada,



7. Kabupaten Tulang Bawang : Karet, Kelapa Sawit
8. Kabupaten Lampung Barat : Kopi, Kelapa dalam, Kakao
9. Kabupaten Pesawaran : Kelapa Dalam, Kakao, Kopi
10. Kabupaten Pringsewu : Kopi, Kakao, Kelapa Dalam
11. Kabupaten Mesuji : Kelapa Sawit, Karet
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat : Karet, Kelapa Sawit
13. Pesisir Barat : Kelapa, Kopi
14. Kota Bandar Lampung : Kakao, Kelapa Dalam, Kopi

Tabel 3.5 Status Pengusahaan Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Provinsi Lampung Tahun 2021

No.	Status Pengusahaan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Perkebunan Rakyat (PR)	723.530	860.851
2.	Perkebunan Besar Negara (PBN)	27.993	79.461
3.	Perkebunan Besar Swasta (PBS)	203.928	792.763
	JUMLAH	955.451	1.733.075

Sumber : Data Statistik Perkebunan Tahun 2021

Untuk pertumbuhan luas areal dan produksi 7 komoditi utama perkebunan (PR + PBN + PBS) dapat di lihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.6 Luas Areal dan Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan
(PR+PBN+PBS) Tahun 2021**

No.	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani Pekebun (KK)
1	Kopi	156.474	116.281	834	141.623
2	Lada	45.642	15.229	476	62.493
3	Kakao	78.872	56.588	892	140.461
4	Karet	233.078	221.530	1.285	163.188
5	Kelapa Dalam	90.439	80.999	1.076	216.894
6	Kelapa Sawit	196.631	449.999	2.614	93.711
7	Tebu	136.225	785.657	5.767	32.636
8	Lain-lain	18.090	6.792	-	37.100
	Jumlah	955.451	1.733.075	-	888.106

Sumber : Data Statistik Perkebunan Tahun 2021

Pengusahaan perkebunan di Lampung terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Peranan PR, PBN dan PBS harus semakin ditingkatkan, karena sebagai sumber pendapatan/devisa daerah maupun negara, menciptakan kesempatan kerja, turut menjaga kelestarian lingkungan, mengatasi kesenjangan antara daerah/wilayah, menjamin kelestarian bahan baku industri dan turut serta dalam upaya mengatasi ketahanan pangan nasional.



Berikut ini perkembangan luas areal dan produksi per komoditi (7 komoditi unggulan) perkebunan rakyat di Provinsi Lampung tahun 2021 adalah:

- **Komoditi Kelapa Dalam**

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang memiliki perkebunan kelapa dalam terluas, yakni 22.083 ha atau 24,42 % dari luas areal perkebunan kelapa dalam rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal komoditi kelapa dalam Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 90.439 ha, berkurang sebanyak 354 ha atau 0,39 % dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan luas areal kelapa dalam terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Selatan sekitar 141 ha karena lahan alih ke komoditi pangan (padi dan jagung), selanjutnya Kabupaten Lampung Timur sekitar 126 ha karena terdampak bendungan marga tiga, Kota Bandar Lampung sekitar 75 ha beralih ke tanaman pangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekitar 19 ha dan Tanggamus sekitar 9 ha beralih ke komoditi hortikultura, Kabupaten Lampung Tengah 8 ha dan Lampung Utara sekitar 2 ha beralih ke tanaman pangan. Meskipun secara umum luas areal kelapa dalam menurun, namun untuk Kabupaten Pesisir Barat mengalami



kenaikan sekitar 28 ha, yang berasal dari kegiatan APBD kabupaten dan Swadaya.

Produksi komoditi kelapa dalam Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 80.999 ton, berkurang 476 ton atau 0,59 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi kelapa dalam tertinggi di Kabupaten Lampung Selatan yaitu 20.836 ton diikuti Kabupaten Tanggamus 16.253 ton dan Lampung Timur 11.274 ton.

- **Komoditi Kakao**

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah yang memiliki perkebunan kakao terluas, yakni 27.357 ha atau 34,81 % dari luas areal perkebunan kakao rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan kakao di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 78.584 ha, berkurang sebanyak 127 ha atau 0,016 % dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan luas areal kakao terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Selatan sekitar 176 ha karena beralih ke komoditi jagung, selanjutnya Kabupaten Pesisir Barat sekitar 36 ha beralih ke komoditi pala, palawija dan Horti, Kabupaten Tanggamus sekitar 3 ha dan Tulang Bawang Barat sekitar 2 ha beralih ke tanaman horti. Meskipun secara umum luas areal Kakao menurun, namun untuk Kabupaten Lampung



Barat mengalami kenaikan seluas 81 ha yang berasal dari swadaya.

Produksi komoditi kakao Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 56.586 ton, turun 921 ton atau 1,60 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi kakao tertinggi di Kabupaten Pesawaran yaitu 28.467 ton diikuti Kabupaten Lampung Selatan 9.062 ton dan Kabupaten Tanggamus 7.216 ton.

- **Komoditi Karet**

Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang memiliki perkebunan karet rakyat terluas, yakni 35.291 ha atau 17,98% dari luas areal perkebunan karet rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan karet rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 196.285 ha, berkurang sebanyak 622 ha atau 0,32 % dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tahun 2021 daerah yang paling banyak berkurang lahan karetnya adalah Kabupaten Lampung Timur berkisar 532 ha, karena terkena dampak bendungan marga tiga. Kabupaten Lampung Selatan sekitar 45 ha beralih ke tanaman pangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekitar 41 ha beralih ke komoditi ubi kayu dan Lampung Barat sekitar 18 ha ke komoditi perkebunan lainnya (aren, kelapa hibrida dan kemiri. Meskipun



secara umum luas areal karet menurun, namun untuk Kabupaten Pesisir Barat mengalami kenaikan sekitar 18 ha, kenaikan berasal dari swadaya masyarakat.

Produksi komoditi karet Provinsi Lampung pada tahun 2020 sekitar 196.717 ton, naik 4.116 ton atau 2,14 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi karet tertinggi di Kabupaten Way Kanan yaitu 52.625 ton diikuti Kabupaten Mesuji 45.413 ton dan Kabupaten Tulang Bawang 34.100 ton.

- **Komoditi Kelapa Sawit**

Kabupaten Mesuji merupakan daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit rakyat terluas, yakni 21.600 ha atau 19,78% dari luas areal perkebunan karet rakyat yang terdapat di Lampung. Luas areal perkebunan sawit rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 109.175 ha, turun sebanyak 164 ha atau 0,15 % dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan luas areal kelapa sawit paling banyak terdapat di Kabupaten Lampung Timur yakni 118 ha, karena terkena dampak bendungan marga tiga. Selanjutnya Kabupaten Lampung Selatan turun sebanyak 84 ha beralih ke tanaman pangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 14 ha beralih ke ubi kayu dan Kabupaten Lampung Barat turun 6 ha karena alih ke aren. Meskipun secara umum



luas areal karet menurun, namun untuk Kabupaten Pesisir Barat mengalami kenaikan sekitar 60 ha, kenaikan berasal dari swadaya masyarakat

Produksi komoditi kelapa sawit Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 198.771 ton, naik 1.132 ton atau 0,57 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi kelapa sawit tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang yaitu 47.140 ton diikuti Kabupaten Lampung Tengah 43.149 ton dan Kabupaten Mesuji 37.151 ton.

- **Komoditi Tebu**

Kabupaten Way Kanan merupakan daerah yang memiliki perkebunan tebu rakyat terluas, yakni 15.803 ha atau 54,79 % dari luas areal perkebunan tebu rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan tebu rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 28.842 ha, naik sebanyak 3.669 ha atau 14,58 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi komoditi tebu Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 189.477 ton, naik sebanyak 40.929 ton atau 27,55 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi tebu tertinggi di Kabupaten Way Kanan yaitu 104.031 ton diikuti Kabupaten



Lampung Tengah 69.329 ton dan Kabupaten Lampung Utara 14.099 ton.

- **Komoditi Lada**

Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang memiliki perkebunan lada terluas, yakni 11.572 ha atau 25,35 % dari luas areal perkebunan lada rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan lada rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 45.642 ha, berkurang sebanyak 192 ha atau 0,42 % dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan luas areal lada paling banyak terdapat di Kabupaten Lampung Barat, yakni 124 ha karena alih ke komoditi cengkeh, kopi dan kakao, selanjutnya Kabupaten Pesisir Barat berkurang sebanyak 37 ha karena alih ke komoditi pala, kelapa dalam dan karet. Kabupaten Mesuji berkurang seluas 17 ha, tanaman tumbuh di pekarangan mati kemudian ditebang, sedangkan Kabupaten Lampung Utara berkurang 16 ha beralih ke komoditi tanaman pangan dan Kabupaten Lampung Tengah berkurang 1 ha alih ke jagung. Meskipun secara umum luas areal lada menurun, namun untuk Kabupaten Tanggamus mengalami kenaikan sebanyak 2 ha yang berasal dari swadaya.



Produksi komoditi lada Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 15.229 ton, turun 183 ton atau 1,19 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi lada tertinggi di Kabupaten Lampung Utara yaitu 3.960 ton diikuti Kabupaten Tanggamus 3.678 ton dan Kabupaten Lampung Barat 3.062 ton.

- **Komoditi Kopi Robusta**

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang memiliki perkebunan kopi rakyat terluas, yakni 54.104 ha atau 34,58% dari luas areal perkebunan kopi rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan kopi rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 156.474 ha, naik sebanyak 16 ha atau 0,01 % dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan luas areal kopi robusta paling banyak terdapat di Kabupaten Tanggamus sekitar 13 ha yang berasal dari swadaya, demplot nestle dan GIZ, selanjutnya Kabupaten Lampung Selatan sekitar 6 ha dan Kabupaten Lampung Barat sekitar 3 ha yang juga berasal dari swadaya masyarakat. Meskipun secara umum luas areal kopi robusta bertambah, namun untuk Kabupaten Lampung Utara berkurang sebanyak 5 ha karena alih ke komoditi pangan dan Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 1 ha karena alih ke komoditi pinang.



Produksi komoditi kopi robusta Provinsi Lampung pada tahun 2021 sekitar 116.281 ton, turun sekitar 1.029 ton atau 0,88 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi kopi robusta tertinggi di Kabupaten Lampung Barat yaitu 54.563 ton diikuti Kabupaten Tanggamus 36.716 ton dan Kabupaten Lampung Utara 10.021 ton.

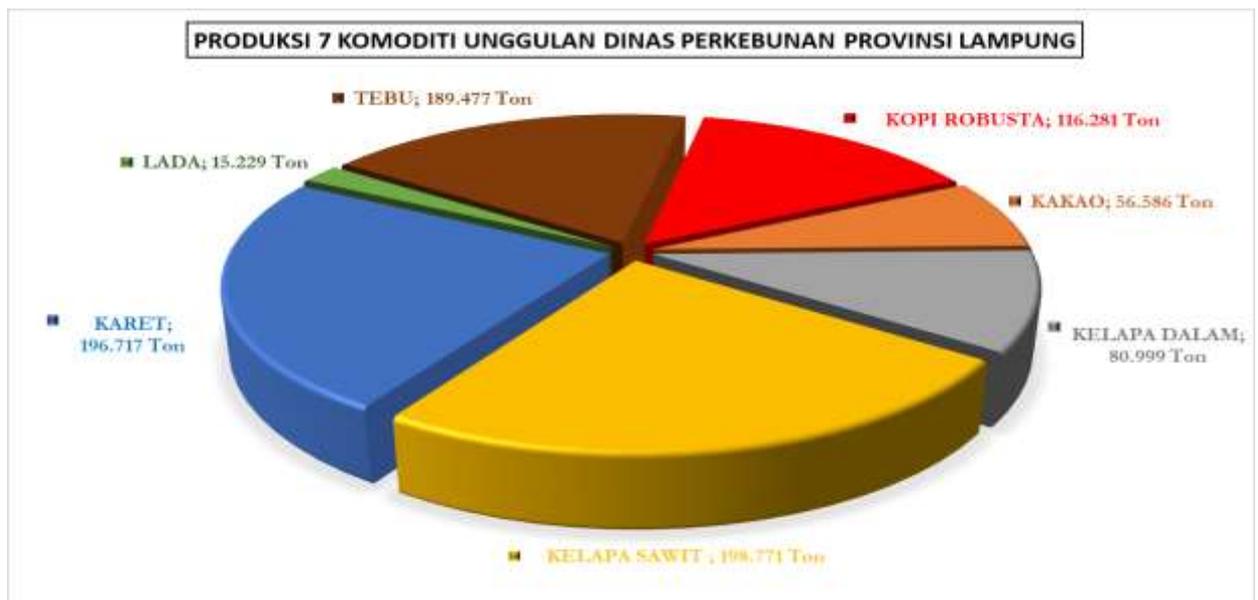
Berdasarkan data-data di atas dapat dilihat bahwa sebaran produksi komoditi unggulan perkebunan Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- (1) Sebaran produksi kopi robusta terbesar terdapat di Kabupaten Lampung Barat (54.563 ton), diikuti Tanggamus (36.716 ton) dan Lampung Utara (10.021 ton).
- (2) Untuk komoditi lada produksi tertinggi di Kabupaten Lampung Utara (3.960 ton), diikuti Kabupaten Tanggamus (3.678 ton) dan Lampung Barat (3.062 ton).
- (3) Produksi komoditi kakao tertinggi di Kabupaten Pesawaran (28.467 ton), diikuti Kabupaten Lampung Selatan (9.062 ton) dan Tanggamus (7.216 ton).
- (4) Selanjutnya untuk komoditi karet produksi tertinggi di Kabupaten Way Kanan (52.625 ton), diikuti Kabupaten Mesuji (45.413 ton) dan Kabupaten Tulang Bawang (34.100 ton).



- (5) Produksi kelapa sawit terbesar di Kabupaten Tulang Bawang (47.140 ton) diikuti Kabupaten Lampung Tengah (43.149 ton) dan Mesuji (37.151 ton).
- (6) Produksi kelapa dalam tertinggi di Kabupaten Lampung Selatan (20.836 ton) diikuti Kabupaten Tanggamus (16.253 ton) dan Lampung Timur (11.274 ton).
- (7) Sedangkan untuk komoditi tebu produksi tertinggi di Kabupaten Way Kanan (104.031 ton) diikuti Lampung Tengah (69.329 ton) dan Kabupaten Lampung Utara (14.099 ton).

Gambar 3.1 Volume Produksi 7 Komoditi Perkebunan Rakyat Tahun 2021 (Ton)

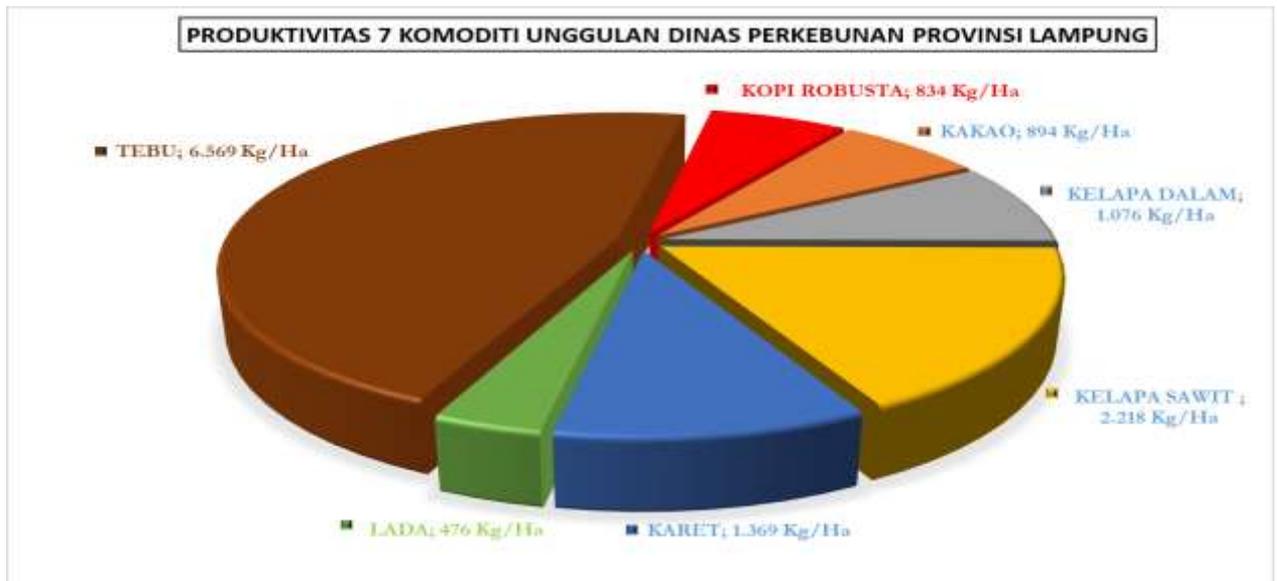


Produktivitas tanaman perkebunan Provinsi Lampung (7 komoditi unggulan) Tahun 2021 dapat dilihat seperti di bawah ini :



- (1) Produktivitas kopi robusta yang berada di kawasan sentra berada di Kabupaten tertinggi di Kabupaten Lampung Barat (1.093 kg/ha), diikuti oleh Kabupaten Tanggamus (984 kg/ha).
- (2) Produktivitas lada di Kabupaten sentra adalah Pesawaran (893 kg/ha) diikuti oleh Lampung Tengah (801 kg/ha) dan Kota Bandar Lampung (650 kg/ha).
- (3) Produktivitas kakao tertinggi di Kabupaten Lampung Barat (1.200 kg/ha) diikuti oleh Pesawaran (1.191 kg/ha) kemudian Kota Bandar Lampung (1.000 kg/ha) dan Kabupaten Lampung Selatan (995 kg/ha).
- (4) Produktivitas karet tertinggi di Kabupaten Way Kanan (2.308 kg/ha), kemudian Kabupaten Mesuji (1.864 kg/ha).
- (5) Produktivitas kelapa sawit tertinggi di Kota Bandar Lampung (2.932 kg/ha).
- (6) Produktivitas kelapa dalam tertinggi di Kabupaten Pesisir Barat (1.565 kg/ha), Kabupaten Mesuji (1.562 kg/ha) dan Kota Bandar Lampung (1.350 kg/ha).
- (7) Produktivitas tebu tertinggi di Kabupaten Lampung Tengah (7.334 kg/ha), diikuti Kabupaten Way Kanan (6.583 kg/ha), Kabupaten Tulang Bawang Barat (4.874 kg/ha) dan Lampung Utara (4.445 kg/ha).

Gambar 3.2 Produktivitas 7 Komoditi Perkebunan Rakyat Tahun 2021 (Kg/Ha)



3.4 Akuntabilitas Keuangan, Pagu dan Realisasi Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya.

**Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		16.374.414.561,95	15.508.760.352,00
	1. Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		194.832.999,92	194.832.800,00
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	129.558.000,00	129.558.000,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.274.999,92	65.274.800,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.816.985.057,03	12.486.001.236,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.794.065.057,03	12.465.408.236,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	22.920.000,00	20.593.000,00
	3. Administrasi Kepegawaian		109.237.000,00	95.728.800,00



	Perangkat Daerah			
		Pemindahan Tugas ASN	36.320.000,00	26.819.800,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.917.000,00	68.909.000,00
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		961.515.000,00	767.090.288,00
		Penyediaan peralatan rumah tangga	50.000.000,00	22.015.500,00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75.000.000,00	44.933.900,00
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	34.800.000,00	12.950.000,00
		Penyediaan Bahan/ Material	173.322.300,00	125.622.523,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	35.537.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	578.392.700,00	526.031.365,00
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.489.052.505,00	1.200.265.247,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi,	410.000.000,00	197.991.462,00



		Sumber Daya Air dan Listrik		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	493.402.505,00	475.476.685,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.650.000,00	526.797.100,00
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		802.792.000,00	764.841.982,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	333.342.000,00	332.625.179,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	29.180.000,00
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	373.070.000,00	369.319.000,00
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	46.380.000,00	33.717.803,00



		lainnya		
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		350.000.000,00	319.385.500,00
	7. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		75.000.000,00	68.513.000,00
		Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan sarana pendukung pertanian	75.000.000,00	68.513.000,00
	8. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		275.000.000,00	250.872.500,00
		Pengelolaan penerbitan sertifikat benih	100.000.000,00	99.998.500,00
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan	175.000.000,00	150.874.000,00
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		8.162.794.000,00	7.495.826.414,00
	9. Penataan Prasarana Pertanian		8.162.794.000,00	7.495.826.414,00
		Perencanaan Pengembangan Prasarana	7.532.864.000,00	6.889.319.010,00



		Kawasan dan Komoditas Pertanian		
		Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya	379.930.000,00	361.618.404,00
		Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	250.000.000,00	244.889.000,00
IV.	Program Perizinan Usaha Pertanian		250.000.000,00	231.721.350,00
	10. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		250.000.000,00	231.721.350,00
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	250.000.000,00	231.721.350,00
V.	Program Penyuluhan Pertanian		4.595.835.250,00	3.432.790.800,00
	11. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		4.245.835.250,00	3.093.159.800,00
		Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi	4.245.835.250,00	3.093.159.800,00



		Pertanian		
	12. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		350.000.000,00	339.631.000,00
		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	350.000.000,00	339.631.000,00
VI.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		250.000.000,00	245.435.000,00
	13. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		250.000.000,00	245.435.000,00
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	200.000.000,00	200.000.000,00
		Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	50.000.000,00	45.435.000,00



Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	MISI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	29.983.043.811,95	27.233.919.417,00	90,83

Bagian yang disajikan dalam tabel di atas terkait dengan efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran agar pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa dari sasaran strategis Peningkatan produksi tanaman perkebunan yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator produksi tanaman perkebunan dengan capaian 101,14%.

Penyerapan anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022 untuk sumber dana APBD dengan anggaran sebesar Rp. 29.983.043.811,95,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.233.919.417 (90,83%). Selain bersumber pada dana APBD,



Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Juga mendapatkan anggaran yang bersumber dari dana APBN dari total anggaran sebesar Rp. 7.522.542.000,00,- yang berasal dari Ditjen Perkebunan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.083.398.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.064.535.250,00,- (98,26%), dana Tugas Pembantuan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.439.144.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.913.437.960,00 (76,31%).

3.9 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan
1. Penentuan Program Kegiatan Prioritas	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana	1. Segera melakukan konsolidasi internal sehingga program kegiatan yang disusun dapat dioptimalkan dalam waktu	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 3. Penataan Prasarana Pertanian
2. Perencanaan Kegiatan yang dilakukan	2. Adanya Revisi atas dokumen-			
3. Koordinasi yang baik				



dengan stakeholder dan instansi yang terkait	dikumen pelaksana kegiatan (DPA dan POK APBN)	pelaksanaanya dan telah dilakukan revisi dokumen pendukung agar sesuai dengan kebutuhan organisasi yang baru	3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Perizinan Usaha Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian	4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 5. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupatenn/Kota 6. Pengembangan Penerapan Penyukuhan Pertanian 7. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
--	---	--	---	--



3.5. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya atau input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil (90,83%) daripada realisasi kinerjanya (101,14).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2022			Anggaran 2022		
			Target	Realisasi*)	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan rakyat	Produksi tanaman perkebunan rakyat (ton)	834.990	844.521	101,14	29.983.043.811,95	27.233.919.417,00	90,83

Keterangan: *) Angka Sementara Tahun 2022



Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 terdapat 6 (enam) program dan 13 kegiatan yang difokuskan yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

10. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
11. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

12. Penataan Prasarana Pertanian

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

13. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian



Provinsi

V. Program Perizinan Usaha Pertanian

14. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Penyuluhan Pertanian

15. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
16. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

3.6 Penghargaan

1. Apresiasi atas Dukungan dan Komitmen dalam Hilirisasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terstandar – ICARE Tahun 2022-2027 pada acara Launching Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) pada tanggal 16 Desember 2022 diberikan oleh Kementrian Pertanian
2. Anugerah Perkebunan Indonesia Tahun 2022 Kategori Pengawasan dan Pendampingan Kebijakan Pembangunan Perkebunan pada acara Perkebunan Indonesia Expo (BUNEX) 2022 pada tanggal 21 Desember 2022 diberikan oleh Kementrian Pertanian



Tabel 3.11 TANGGAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR :700/02/LHE/IV.01/10/2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022

No.	SARAN HASIL REVIEW	TANGGAPAN
1	Evaluasi atas perencanaan kinerja Agar Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam menyusun dokumen teknis perencanaan kinerja dapat menyesuaikan mandat kebijakan nasional/ program strategis nasional, Agar segera mengupdate dokumen kinerja/ kegiatan pada laman website resmi Dinas Perkebunan, dapat merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja bagi setiap pegawai, dan dalam menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA/DPA Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam menyusun dokumen teknis perencanaan kinerja akan menyesuaikan mandat kebijakan nasional/ program strategis nasional, akan mengupdate dokumen kinerja/ kegiatan pada laman website resmi Dinas Perkebunan, merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja bagi setiap pegawai, dan dalam menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA/DPA Dinas Perkebunan
2	Evaluasi atas pengukuran kinerja Agar setiap pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/ mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/ dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan (Decision Maker), Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan	Setiap pegawai diberikan pemahaman atas hasil pengukuran kinerja, pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/ mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/ dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan (Decision Maker), serta pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan



3	Evaluasi atas pelaporan kinerja Agar Dinas Perkebunan segera mengupload laporan kinerja tahun 2021 pada laman website resmi Dinas Perkebunan, agar dalam membuat laporan kinerja dapat memuat mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dan agar setiap pegawai peduli dan dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja	Dinas Perkebunan akan mengupload laporan kinerja tahun 2021 pada laman website resmi Dinas Perkebunan, membuat laporan kinerja yang memuat/ mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dan psetiap pegawai dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja
4	Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Agar Dinas Perkebunan dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2021, dapat memberikan bukti dukung/ kelengkapan evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi, belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Ke depan Dinas Perkebunan dapat meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal